

BAB II

WACANA PEMBANGUNAN SMELTER FREEPORT DI TIMIKA-PAPUA

2.1 Pembangunan Smelter Freeport

Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR RI tahun 2016, Presiden Direktur Freeport Indonesia saat itu, Chappy Hakim, mengatakan bahwa Freeport baru akan membangun *smelter* jika sudah ada kepastian perpanjangan kontrak. Dalam rezim kontrak karya, kontrak karya freeport akan berakhir sampai tahun 2021 dan Freeport meminta perpanjangan kontrak sampai tahun 2041.¹ Permintaan itu masuk akal mengingat pembangunan smelter tembaga membutuhkan dana senilai US\$2,3 miliar. Bukan hanya itu, freeport juga sedang berinvestasi di tambang underground Grasberg Blok Cave, *Deep Mill Level Zone* (DMLZ), dan Deep Ore Zone (DOZ) dengan investasi sebesar US\$11 miliar, dengan demikian, freeport bakal merugi jika pembangunan smelter, sementara kontraknya belum jelas. Meski demikian, klausul perpanjangan kontrak adalah salah satu dari enam klausul dalam renegotiasi kontrak. Yang lainnya adalah kenaikan royalti, penggunaan barang-jasa domestik, pengurangan luas lahan divestasi saham, dan pembangunan smelter. Freeport belum sepakat dengan klausul divestasi saham, pembangunan smelter, dan

¹Ferdy Hasiman, *FREEPORT: bisnis orang kuat vs kedaulatan negara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2019, halaman 249.

perpanjangan kontrak. Freeport, misalnya sudah sepakat dengan divestasi saham, tetapi harga yang dipatok perusahaan itu terlampau mahal. Padahal, jika pemerintah lihai, divestasi saham tidak perlu dilakukan sekarang, tetapi menunggu sampai masa kontrak berakhir tahun 2021. Pada tahun itu juga, lahan milik freeport dikembalikan kepada negara secara gratis. Perpanjangan kontrak akan dengan mudah didapat Freeport jika perusahaan itu sepakat dan menuntaskan lima klausul renegotiasi kontrak yang lain, karena pemerintah memiliki perhitungan matang dalam mengambil keputusan strategis.

Pembangunan Smelter penting bagi semua perusahaan tambang. Sejak 12 Januari 2014, pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor. Larangan ekspor mineral mentah adalah amanat UU No 4/2009 tentang Minerba. UU Minerba itu mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter agar memiliki *multiplier effect* bagi pembangunan. Selama ini freeport mengirim konsentrat tembaga ke dua smelter besarnya di PT. Smelting Gresik, Jawa Timur dan Atlantic Copper di Spanyol. Sekitar 60% konsentrat tembaga freeport dikirim ke Atlantik Copper dan sisanya sebanyak 37% dikirim ke PT. Smelting Gresik. Tahun 2002 misalnya, freeport mengirim 1.016.700 metrik ton dan 964.400 metrik ton konsentrat tembaga ke Atlantik Copper. Sementara itu, pengiriman konsentrat tembaga ke PT. Smelting Gresik sebesar 719 ribu metrik ton (2002) dan 824 ribu metrik ton (2003). Dengan kebijakan hilirisasi, freeport tidak perlu lagi mengirim konsentrat tembaga ke spanyol dengan biaya besar. Freeport wajib

membangun smelter dalam negeri. Meskipun demikian, pembangunan smelter Freeport masih menyisahkan dua persoalan besar. Dalam bukunya Ferdy Hasiman yang berjudul *FREEPORT: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara* menguraikan dua persoalan besar terkait pembangunan Smelter Freeport, *Pertama* pembangunan smelter melibatkan elit dan grup-grup bisnis besar dan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Dalam tulisannya Ferdy Hasiman menyampaikan bahwa, konstruksi Smelter akan mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan, seperti PT. Petrokimia Gresik dan perusahaan semen PT. Semen Indonesia yang mendapat bahan baku dari smelter tembaga. Petrokimia akan menyerap *sulphuric acid* (bahan baku pupuk) dan Semen Indonesia menyerap *granulated slag gypsum* (bahan baku semen). *Kedua* penetapan lokasi pembangunan smelter di Gresik mengabaikan Papua. Dalam masalah yang kedua ini Fredy Hasiman menyampaikan bahwa, pilihan lokasi pembangunan smelter di Gresik menyebabkan Papua kehilangan kesempatan berinvestasi pada produk ikutan dari tembaga yang sangat banyak. PT. Smelting yang berkapasitas 300 ribu ton.²

Jika wacana untuk membangun Smelter disepakati, maka akan ada dua dampak yaitu antara untung atau rugi yang harus dipertimbangkan lalu diputuskan dengan baik oleh pemerintah untuk tempat pembangunan Smelter. Tujuan pemerintah Indonesia untuk menguasai dan mandiri dalam ekonomi akan didapat secara maksimal, jika pemerintah konsisten melakukan kontrol

²Ferdy Hasiman, *FREEPORT: bisnis orang kuat vs kedaulatan negara*, PT Kompas media nusantara, jakarta, 2019, halaman 251-257.

ketat dan memilih tempat untuk membangun Smelter agar tetap jatuh pada kekuasaan pemerintah dan rakyat yang membutuhkan.

2.2 Pembangunan Smelter siapa yang dirugikan?

Sejak tahun 1967-2019, Selama 51 tahun lebih (setengah abad) perusahaan TNCs (Transnational Cooperation) yang bernama PT.Freeport Indonesia telah menguasai kemudian mengeksploitasi gunung tembaga dan emas yaitu Esberg dan Grasber tanpa memberikan satu keuntungan yang lebih kepada pemerintah Indonesia dan Papua sebagai pemilik sumber daya alam tersebut. PT.Freeport Indonesia beroperasi selama setengah abad telah meninggalkan rekam jejak yang buruk, yaitu dengan melakukan kerusakan lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), ketidakadilan dalam memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat asli Papua. Sejak rezim presiden Soeharto hingga presiden Soesilo Bambang Yudhiyono (SBY) tidak mampu menundukan perusahaan kapitalis global tersebut dibawah kekuasaan negara sepenuhnya, justru perusahaan tersebut telah mengendalikan negara dibawah kekuasaannya sehingga negara Indonesia tidak berdaya hampir setengah abad lebih. *“Pemerintah Indonesia telah tersandera oleh Kontrak Karya (KK) sehingga tidak mampu berbuat apa-apa selama 50 tahun lebih oleh PT.Freeport Indonesia”* (Prof. Mahfud MD).

Kemudian baru ini sejak pemerintahan rezim Joko Widodo, Indonesia telah berani menundukan PT. Freeport Indonesia dengan beberapa point kebijakan yaitu, Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK), Divestasi Saham 51,2 persen, Pembangunan fasilitas Smelter, dan pembayaran royalti. Tentu pembangunan pabrik smelter ini secara ekonomi akan menguntungkan bagi pemerintah Indonesia, apalagi pabrik Smelter tersebut dibangun di Timika-Papua maka dampak ekonomi akan sangat berpengaruh bagi masyarakat Papua, khususnya bagi kedua suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat.

Terkait dengan tempat pembangunan fasilitas Smelter sempat terjadi polemik dan berujung pada pro dan kontra. Gubernur provinsi Papua telah menyatakan bahwa pabrik smelter harus dibangun di Papua, sementara pihak Freeport menginginkan smelter harus dibangun di Gresik-Jawa Timur. Terlepas dari pro dan kontra, dalam buku Ferdy Hasiman, telah menulis ada dua masalah pokok terkait pembangunan Smelter. *Pertama*, pembangunan smelter melibatkan elite dan group-group bisnis besar dan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). *Kedua*, penetapan lokasi pembangunan smelter di Gresik mengabaikan Papua. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan Smelter di Gresik-Jawa Timur hanya akan menguntungkan para elite politik dan para kapitalis lokal lalu kemudian mengabaikan masyarakat Papua. Sehingga gubernur Papua, Lukas Enembe, pada tahun 2015 mengatakan, jika tidak membangun smelter di Papua, Freeport diminta segera keluar dari daerah itu. Lukas Enembe menegaskan agar pemerintah pusat dan Freeport tidak menganggap sepele pembangunan smelter itu. Menurut Lukas Enembe, rakyat Papua selama ini kerap dikecewakan karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak memberi manfaat bagi rakyat Papua.

Mereka hidup dalam garis kemiskinan dan menjadi penonton atas pembangunan di Papua.

Kondisi ini memperkuat keyakinan Andre Gunder Frank yang mengatakan bahwa, *“kapitalisme, baik yang global maupun yang nasional, adalah faktor yang telah menghasilkan keterbelakangan di masa lalu dan yang terus mengembangkan keterbelakangan di masa sekarang”*³. Dengan demikian, keterbelakangan bukan suatu kondisi alamiah dari sebuah masyarakat. Bukan juga karena masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, politik dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran merupakan akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara-negara pusat.

2.3 Pembangunan smelter siapa yang diuntungkan?

Dalam buku Ferdy Hasiman, ada dua masalah pokok terkait pembangunan Smelter. *Pertama*, pembangunan smelter melibatkan elite dan group-group bisnis besar dan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Dalam kesimpulannya ketika pabrik Smelter dibangun di Gresik-Jawa Timur maka yang akan diuntungkan adalah para kapitalis lokal, yaitu para pengusaha Indonesia yang merepresentasi individu dan elite-elite politik yang super kaya di republik ini, sehingga tidak ada ruang bagi keuntungan masyarakat. Sekalipun didalamnya ada perwakilan dari pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara

³ Budiman Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 64.

(BUMN), tetapi jika tidak dikontrol dan diarahkan dengan ketat maka yang akan menguasai adalah para kapitalis lokal atau pengusaha gelap yang mencari keuntungan. Disisi lain tidak hanya menguntungkan kapitalis lokal, namun akan menguntungkan perusahaan PT.Freeport sendiri karena ketika pabrik smelter di bangun di Gresik-Jawa Timur maka yang akan terjadi adalah manuver besar antara grup-grup bisnis dan pemegang saham Pelindo (BUMN), yang mana perusahaan-perusahaan ini sudah lama menjalin kerja sama dengan PT.Freeport Indonesia. Seperti AKR Corporindo (yang dikontrol keluarga Adikoesoemo) yang sudah lama menjalin relasi bisnis dengan Freeport untuk memasok BBM.

Dengan demikian lahirlah apa yang disebut oleh seorang sosiolog asal Amerika yang bernama Peter Evans sebagai *Aliansi Tripel*, yakni kerjasama antara (1) modal asing, (2) pemerintah di negara pinggiran yang bersangkutan, dan (3) borjuasi lokal. Modal asing, melalui perusahaan-perusahaan multinasional raksasa, melakukan investasi di negara pinggiran tersebut. Pemerintah lokal, yang membutuhkan modal, teknologi dan akses kedalam pasar dunia untuk bisa menyelenggarakan pembangunan di negaranya, tentu saja membutuhkan bantuan perusahaan multinasional ini. Tetapi, supaya pemerintah lokal ini tidak ditudu menjadi alat dari modal asing, borjuasi lokal harus disertakan. Dengan demikian, pembangunan tidak sepenuhnya ada ditangan modal asing⁴.

Kerjasama antara pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerjasama ekonomi, dalam arti bahwa kerjasama tersebut memang diperlukan bila negara itu

⁴ Budiman Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 77-78.

ingin mendorong terjadinya proses Industrialisasi. Sedangkan kerjasama antara pemerintah dan borjuasi lokal bersifat politis, dalam arti tujuan kerjasama tersebut terutama adalah untuk mendapatkan legitimasi politik, supaya pemerintah tersebut dapat diterima sebagai negara nasional yang memperjuangkan kepentingan bangsa.

